

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN VISUM ET  
REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Islam Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**HUSNAH  
10300112048**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnah  
NIM : 10300112048  
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Alamat : Pallangga Gowa  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Visum Et  
Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan  
Negeri Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 24 Februari 2016

Penyusun,

**HUSNAH**

NIM: 10300112048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Makassar”, yang disusun oleh Husnah, NIM:10300112048, Mahasiswi Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 21 Maret 2016, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Maret 2016.  
19 Jumadil akhir 1437 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam S, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Dudung Abdullah, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Abdi Wijaya, S.S., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Usman, MA	(.....)
Pembimbing II	: Istiqamah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag  
NIP: 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut Nama Allah swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan Semesta Alam. Terima kasih atas nikmat Iman, nikmat Ilmu, nikmat kesehatan, nikmat kasih sayang dan begitu banyak nikmat Allah swt. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kami Muhammad saw., keluarga dan sahabat.

Selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tidak henti-hentinya Allah swt. melimpahkan beragam nikmatnya dan dibawah bimbingan para pendidik sehingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelas Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua yang Tercinta yang telah melahirkan, mendidik, dan membesarkan penyusun, semoga Allah swt. senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya, Kasih Sayang-Nya, dan Maghfirah-Nya kepada keduanya, serta kakakku tercinta dan kak Salam yang selalu membantu dan mendukung selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, serta para wakil Rektor, dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibunda Dra. Nila Sastrawati., M. Si selaku ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Ibu Dr. Kurniati, S. Ag., M. Hi selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan ketatanegaraan, dan Kak Canci selaku staf Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Prof. Dr. Usman, MA selaku pembimbing I dan Ibu Istiqamah, SH., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan, mulai dari judul hingga selesainya skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu mengarahkan penyusun hingga taraf penyelesaian.
7. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Makassar yang telah memberikan izin kepada penyusun dalam melakukan penelitian di Instansi yang Beliau pimpin sehingga data yang menunjang skripsi ini bisa didapatkan.
8. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, dan seluruh stafnya serta Kepala Perpustakaan yang pernah penyusun kunjungi yang telah memberikan fasilitas, tempat dan waktu bagi pelaksanaan penelitian.
9. Terkhusus pula untuk teman-teman seperjuangan: Radiaty, Ummul, Vina, Lia, Nilma, Agus, Khaer, dan seluruh teman-teman grasi HPK 012 yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya selama ini. Kalian adalah yang Terbaik.

Akhir kata semoga Allah swt. memberikan balasan berlipat ganda kepada semua yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penyusun berharap agar skripsi ini dapat diterima bagi khlayak umum, maka dari itu saran dan kritik yang membangun penyusun harapkan demi menambah wawasan.

Samata, 24 Februari 2016

Penyusun,

**HUSNAH**

NIM: 10300112048

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1-17
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian .....	13
D. Kajian Pustaka .....	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	18-46
A. Pengertian Pembuktian Menurut Hukum Islam.....	18
B. Macam-macam Alat Bukti dan Pendapat Para Ulama tentang Alat Bukti .....	24
C. Pengertian Visum Et Repertum .....	37
D. Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum .....	41
E. Visum Et Repertum menurut Hukum Islam .....	43

BAB III METODE PENELITIAN .....	47-52
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	50
E. Instrumen Penelitian .....	50
F. Teknik Pengolahan dan analisis Data .....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	53-69
A. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Makassar .....	53
B. Urgensi Pembuktian Visum Et Repertum dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar .....	55
C. Kedudukan Visum Et Repertum dalam Pembuktian menurut Hukum Islam .....	62
BAB V PENUTUP .....	70-71
A. Kesimpulan .....	70
B. Implikasi .....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
PEDOMAN WAWANCARA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

## 3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

#### 4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالُ الرَّوَضَةُ : *raudah al- atfal*

الْقَاضِيَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fizilaal Al-Qur’an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### **9. Lafz al- Jalaalah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ *diinullah* بِاللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

*hum fi rahmatillaah*

### **10. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

*Wa ma muhammadun illaa rasul*

*Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan*

*Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'an*

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
KUHP	= Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KUHAP	= Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
UU	= Undang-undang

t.t. = Tanpa tempat penerbit

t.th. = Tanpa tahun penerbit



## ABSTRAK

**Nama : Husnah**

**NIM : 10300112048**

**Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Visum Et Repertum  
dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar**

---

Pokok masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah “bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan” Permasalahan ini dianalisis ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah urgensi pembuktian *visum et repertum* dalam hal penjatuhan putusan tindak pidana oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar?, 2) Bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam hal pembuktian menurut hukum Islam?

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yuridis normatif, normatif syar’i dan sosiologi. Sumber data penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Makassar serta paniteranya, hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dan juga masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dalam tentang Islam. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan, setelah itu data dianalisis dengan analisa data kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang selanjutnya dianalisa menggunakan metode analisa deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan menurut tinjauan hukum Islam.

Hasil penelitian adalah bahwa urgensi *visum et repertum* merupakan suatu alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *visum et repertum* merupakan alat bukti pelengkap saja. Namun dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada sangatlah minim atau kurang, maka *visum et repertum* merupakan bukti pokok yang harus dijadikan dasar oleh hakim. Sehingga *visum et repertum* juga dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan. Kedudukan *visum et repertum* dalam hukum Islam adalah sebagai penerapan ijtihad bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yakni sebagai alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah* karena dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia.

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan alat bukti yang maksimal dalam proses peradilan, maka hakim harus menerima alat bukti *visum et repertum* sebagai alat bukti yang pokok terutama dalam kasus penganiayaan karena *visum et repertum* merupakan alat bukti yang nyata yang isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Kemudian dalam proses persidangan hakim harus melakukan pemanggilan terhadap saksi ahli untuk memperjelas surat *visum et repertum* yang telah dibuatnya.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berdasarkan atas Negara hukum, dimana segala sesuatunya diatur oleh hukum. Aturan hukum seakan menjadi tiang utama dalam mengatur segala tindakan-tindakan yang dilakukan dalam masyarakat, segala tindakan yang dilakukan tidak terlepas oleh aturan hukum sehingga setiap tindakan harus diperhatikan jangan sampai melanggar aturan yang ada atau bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM). Karena apabila melanggar aturan atau hak asasi manusia dapat diproses melalui hukum yang berlaku pada suatu Negara.

Salah satu ciri utama dari suatu Negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya dalam menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar aturan-aturan hukum yang ada. Hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur kehidupan manusia agar dapat menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketenteraman, kedamaian, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan tentunya diancam dengan sanksi.<sup>1</sup> Sehingga setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

---

<sup>1</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

Tindakan kejahatan merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum.<sup>2</sup> Tindakan kejahatan seakan menjadi makanan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seseorang seakan-akan tidak takut akan aturan hukum yang ada.

Hal ini dapat dilihat pada fenomena yang ada bahwa masih banyak tindakan kejahatan yang terjadi padahal segala tindakan dan tingkah laku serta perbuatan telah diatur dalam Undang-undang. Tapi hal ini sangat ironis di tengah banyaknya peraturan yang mengatur mengenai tindakan kejahatan dan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat masih banyak tindakan yang melanggar aturan hukum.

Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan masyarakat khususnya di Kota Makassar adalah tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang baik itu dilakukan oleh individu maupun berkelompok, yang tanpa disadari ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat karena sering kali yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya. Akibat seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan dalam kehidupan masyarakat hal ini seakan menjadi sesuatu yang

---

<sup>2</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 33.

biasa sehingga menyebabkan banyak orang beranggapan bahwa tindak pidana penganiayaan itu lumrah dilakukan tanpa harus takut dengan aturan yang telah ditetapkan.

Perbuatan penganiayaan di dalam KUHP disamakan dengan merusak kesehatan, yang dibedakan antara penganiayaan ringan, penganiayaan berencana dan penganiayaan berat yang diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Menurut pasal 351 KUHP dikatakan perbuatan penganiayaan diancam dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Jika perbuatannya berakibat luka berat pidana penjara paling lama lima tahun, jika korban meninggal maka pelaku dipidana paling lama tujuh tahun. Percobaan untuk melakukan penganiayaan tidak dipidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilarang dalam aturan hukum saja tetapi juga diajarkan dalam Islam, dalam tindak pidana penganiayaan (*jarimah*) tidak sengaja, dalam Islam menentukan batas-batas hukum diyat, begitu pula tindak pidana penganiayaan sengaja, juga telah ditentukan hukumannya dengan membayar diyat. Menurut aturan umum dalam Syara' tindak pidana penganiayaan yang belum ditentukan diyatnya, maka hal itu diserahkan pada hakim dengan mengambil pertimbangan orang-orang ahli. Aturan tersebut sudah menjadi kesepakatan (*ijma*).<sup>4</sup>

Tindak pidana penganiayaan pada akhir-akhir ini sering terjadi dimana-mana tanpa mengenal tempat dan waktu. Bahkan berita yang meliput mengenai tindakan

---

<sup>3</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2005), h. 131.

<sup>4</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 66.

penganiayaan sering muncul di media sosial ataupun sumber berita lainnya. Tindak pidana penganiayaan biasa dilakukan karena berbagai faktor diantaranya yaitu akibat tersinggung, salah paham, dendam dan lain sebagainya.

Mengingat tindak pidana penganiayaan sudah merajalela dan sering terjadi, bahkan tidak sedikit menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan tindakan tegas aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kejahatan yang terjadi di Kota Makassar khususnya dalam hal tindak pidana penganiayaan.

Hal ini terlihat dari kasus penganiayaan yang masuk atau terdaftar di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2015 adalah sebanyak 63 kasus, yang memperlihatkan bahwa betapa mudahnya seseorang melakukan penganiayaan. Menurut data register yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, pelaku penganiayaan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak. Dari kasus penganiayaan yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar ada 43 kasus yang menggunakan alat bukti *visum et repertum* dalam pembuktiannya sedangkan 20 kasus lainnya tidak menggunakan alat bukti *visum et repertum* karena dua alasan yakni karena alat bukti yang ada sudah cukup kuat tanpa adanya *visum et repertum* dari dokter serta karena keluarga dari pihak korban menolak untuk melakukan *visum et repertum* tersebut. Data tersebut diambil dari buku register yang ada di Pengadilan Negeri Makassar.

Masalah tindak pidana yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat diselesaikan dengan mudah selama kehidupan masih berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan oleh manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindakan . Dan untuk mengurangi tindakan yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan menjalankan aturan-aturan hukum yang telah ada dengan baik. Sehingga seseorang yang melakukan pelanggaran dapat merasakan efek jera dari tindakannya.

Pada dasarnya tujuan dari pidana sejatinya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum agar dapat menjaga kepentingan publik.<sup>5</sup> Pada hakikatnya pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan dan status sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekangnya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masalah kejahatan tetap menjadi aktual dan wacana masyarakat dan pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum untuk segera menanggulangnya.<sup>6</sup>

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana

---

<sup>5</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 1.

<sup>6</sup>Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi* , h. 35.

ditentukan dalam Undang-undang RI Nomor.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.<sup>7</sup>

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan didalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1988 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP). Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada pasal 120 ayat (1), yang menyatakan : “Dalam hal penyidik menganggap perlu, Penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.<sup>8</sup>

Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan, disebutkan pada pasal 180 ayat (1) yang menyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.<sup>9</sup>

Keterangan ahli sebagaimana yang disebutkan dalam kedua pasal KUHP tersebut, diberikan pengertiannya pada pasal 1 butir ke-28 KUHP, yang menyatakan

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Edisi II (Jakarta: t.p., 2008), h. 72.

<sup>8</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP (t.t.: WIPRESS, 2008), h. 590.

<sup>9</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP, h. 604.

<sup>10</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP, h. 562-563.



Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Pada hakekatnya keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>11</sup>

Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus penyidik membutuhkan bantuan tenaga ahli seperti, dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut. Pada prinsipnya keterangan ahli dapat diajukan melalui dua tahapan prosedural yakni keterangan ahli yang diminta oleh penyidik guna kepentingan penyidikan dan keterangan ahli yang diminta serta diberikan pada sidang pengadilan.<sup>12</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat harus memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Sebelum seseorang ditetapkan

---

<sup>11</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), h. 88.

<sup>12</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, h. 89-91.

sebagai pelaku harus ada bukti-bukti yang dapat memperkuat terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dan setelah ada bukti-bukti yang akurat kemudian bisa diproses melalui proses hukum yang telah ada. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. Menurut pengertiannya, *visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis oleh dokter, atas sumpah jabatan atau berdasarkan keilmuan tentang apa yang dilihat atau diperiksa untuk kepentingan peradilan atas permintaan tertulis dari penyidik.<sup>13</sup>

Pembuatan *visum et repertum* memberikan tugas sepenuhnya kepada dokter sebagai pelaksana di lapangan untuk membantu jaksa dalam menentukan arah dakwaan yang akan didakwakan terhadap terdakwa, serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materil dalam memutuskan perkara pidana. Dokter dilibatkan untuk turut dalam memberikan pendapat berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam pemeriksaan perkara pidana penganiayaan, apabila menyangkut tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia. Pendapat dokter diperlukan karena seorang polisi, jaksa maupun hakim tidak dibekali ilmu-ilmu yang berhubungan dengan anatomi

---

<sup>13</sup>Purnawan Junadi, *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi II (Jakarta: Media Aesculapius Fakultas Kedokteran UI, 1982), h. 740.

tubuh manusia, yaitu dalam rangka menemukan kebenaran materil atas perkara pidana.

Salah satu ahli forensik yang terkenal di Indonesia adalah Ahli Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Abdul Mun'im Idries. Beliau telah membuat banyak *visum et repertum* untuk kasus-kasus besar yang ada di Indonesia misalnya kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, dalam kasus tersebut bukan hanya pembunuhan yang menyeret orang-orang penting sebagai korban dan terhukum. Namun, lebih menjadi pembuktian bahwa ilmu kedokteran forensik bisa menaklukkan rekayasa yang dilakukan manusia.

Setelah melakukan serangkaian penelitian, Dr Mun'im pun membuat kesimpulan yang mengejutkan dalam berkas *visum et repertum* yang dibuatnya pada 30 Maret 2009. "...peluru pertama masuk dari arah belakang sisi kepala sebelah kiri dan peluru yang kedua masuk dari arah depan sisi kepala sebelah kiri, diameter kedua anak peluru tersebut 9 milimeter dengan ulir ke kanan, hal tersebut sesuai dengan peluru yang ditembakkan dari senjata api kaliber 0,38 tipe S&W."<sup>14</sup>

Seperti dalam kasus pembunuhan Nasrudin, Dr Mun'im dengan gamblang melontarkan dugaan adanya rekayasa. Beliau menyatakan menerima jasad Nasrudin tidak dalam keadaan aslinya. Jenazah itu tidak berbaju dan lubang peluru di kepalanya sudah dijahit. Padahal, bagi dokter forensik, kondisi jenazah tersebut harus

---

<sup>14</sup>Subekti, "Otobiografi Mun'im: Sepotong Jasad, Seribu Cerita", *Tempo Inter aktif.Com*. <http://www.kasusahliforensik/OtobiografiMun'im/SepotongJasadSeribuCerita/TempoNasional.html/> (17 Maret 2016)

persis sama dan lengkap seperti saat dia meninggal. Dr Mun'im pun menuliskan bahwa dirinya sempat diminta menyerahkan proyektil peluru yang merenggut nyawa Nasrudin oleh seorang polisi. Padahal, pengujian dan rekonstruksi balistik belum kelar dilakukan. Meski tak menjelaskan akhir kasus ini dengan jelas, publik sudah tahu bahwa ada dua penegak hukum yang terseret dalam kasus ini dan publik juga bisa menebak untuk apa serangkaian rekayasa itu dilakukan. Dari kasus ini sudah sangat jelas bahwa keberadaan *visum et repertum* sangat berguna dalam membantu penyelidikan terutama dalam tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa.

Adapun prosedur dari pemeriksaan perkara pidana penganiayaan termasuk kasus dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahapan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan kepolisian, tahapan penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum dan tahapan pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari penyidikan harus ada pembuktian yang menguatkan tentang kesalahan dari seorang tersangka. Untuk kasus diperlukan adanya keterangan ahli untuk menguatkan telah terjadi yang dituangkan kedalam *visum et repertum*.

Di dalam tahapan penyidikan itulah maka penyidik bertugas untuk mencari dan mengumpulkan bukti, sehubungan dengan itu maka menurut ketentuan hukum acara pidana. Bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta bantuan seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, untuk penyidikan terhadap kasus maka diperlukan bantuan dari seorang ahli untuk mengetahui bilamana terjadi suatu keadaan dimana seorang menderita sakit atau luka atau meninggal dunia sehingga perlu melibatkan dokter untuk menanganinya.

Tugas dari seorang dokter kehakiman di dalam membantu aparat penegak hukum sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya di dalam menangani kasus tindak kriminal yaitu misalnya di dalam melakukan pemeriksaan luka, memeriksa mayat atau bagian tubuh mayat, memeriksa mayat dalam penggalian mayat, memeriksa benda/barang bukti lain dari sipelaku ataupun si korban.

Pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *visum at repertum* bertujuan untuk mencari kebenaran dalam mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. *Visum et repertum* ditinjau dari segi tujuan dan penggunaan yang menunjang tegaknya keadilan, sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Untuk mengetahui hal tersebut maka, dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban atau pembedahan diri mayat untuk mengetahui kelainan alat tubuh manusia yang mengalami kerusakan atau kematian akibat tindak pidana.

Dengan demikian *visum et repertum* sebagai pengganti korban yang merupakan barang bukti yang tidak bisa ditampilkan dalam sidang pengadilan karena barang bukti yang terdapat di dalam diri korban tidak bisa ditampilkan dimuka persidangan. Untuk memperlihatkan barang bukti yang secara asli maka, menggunakan *visum et repertum* sebagai pengganti barang bukti.

Dalam hukum Islam penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti merupakan hal yang baru dan menjadi penerapan ijtihad bagi hakim dalam memperoleh kebenaran dan keadilan sehingga dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia. *Visum et repertum* dalam hukum Islam termasuk dalam alat bukti tertulis atau *al-bayyinah*. Pada masa sekarang ini masih kurang pembahasan tentang bagaimana penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti terutama dalam tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yaitu: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembuktian Visum Et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang digali dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan? Permasalahan ini dianalisis ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah urgensi pembuktian *visum et repertum* dalam hal penjatuhan putusan tindak pidana oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar?
2. Bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam hal pembuktian menurut hukum Islam?

### **C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian**

#### **1. Deskripsi Fokus**

Penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam mendefenisikan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat (pidana Islam). Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk digunakan dalam pidana Islam, yang juga akan diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam, baik lokal maupun nasional.<sup>15</sup>
- b. Pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.<sup>16</sup>
- c. *Visum et repertum* ialah : “yang dilihat dan diketemukan”, Jadi *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat, Jadi merupakan kesaksian tertulis.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Supardin, *Materi Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 22.

<sup>16</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, t.th.), h. 32.

<sup>17</sup>R.Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Bandung: Tarsito, 1983), h. 18.

- d. Tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang oleh aturan hukum, ancaman pidana bagi yang melanggar. Perbuatan manusia boleh dilarang oleh hukuman berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok-pokok pengertian terletak pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya (pelakunya).<sup>18</sup>
- e. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan sipetindak.<sup>19</sup>

## 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengadilan negeri makassar. Judul skripsi ini, mengembangkan sejauh mana urgensi pembuktian *visum et repertum* terhadap penjatuhan putusan oleh hakim, apakah dengan adanya *visum et repertum* dapat membantu hakim dalam penjatuhan putusan terhadap kasus tindak pidana atau tidak dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan.

### D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum islam terhadap pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan. Meskipun sudah banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum

---

<sup>18</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72.

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 12.



ada yang secara spesifik membahas tentang judul skripsi ini. Adapun beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Dalam buku *Ilmu Kedokteran Kehakiman* yang ditulis oleh Waluyadi yang membahas tentang masalah kedokteran yang berkaitan dengan bidang hukum, secara terperinci diuraikan bagaimana peranan, tugas serta tindak pidana yang memerlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman. Termasuk membahas bagaimana *visum et repertum* digunakan atau diperlukan dalam pembuktian dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun dalam buku ini tidak menjelaskan secara terperinci bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan.

Dalam buku *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* oleh Ledeng Marpaung membahas tentang tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh serta jenis penjatuan sanksi tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh. Namun dalam buku ini belum menjelaskan secara spesifik dan juga belum memberikan penjelasan bagaimana solusi serta pencegahan terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan.

Dalam buku *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* yang ditulis oleh Adami Chazawi membahas tentang bagaimana gambaran aspek hukum positif khususnya tentang kejahatan-kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang ditinjau dari doktrin-doktrin hukum sekaligus penerapannya dalam berbagai praktik hukum. Namun dalam buku ini belum membahas tentang bagaimana penggunaan bukti *visum et repertum* dalam pembuktian terkait dengan kejahatan terhadap tubuh dan nyawa.

Dalam buku *Delik- Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* yang ditulis oleh P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang membahas tentang kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan hak yang timbul dari hak milik sebagai jenis kejahatan yang paling banyak terjadi sehari-hari, seperti masalah kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan lain yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan yang terjadi dimasyarakat. Namun dalam buku ini belum membahas tentang bagaimana sistem pembuktian yang digunakan terhadap kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan terutama pembuktian dengan menggunakan alat bukti *visum et repertum*.

Dalam buku *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif* yang ditulis oleh Anshoruddin membahas tentang macam-macam alat bukti menurut hukum acara Islam yang bersumber dari nas al-Qur'an ataupun hadis dan juga menurut hukum positif. Namun dalam buku ini belum membahas bagaimana kedudukan alat bukti *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan terutama dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan pembahasan tentang pembuktian dalam suatu tindak pidana. Namun belum ada yang membahas secara spesifik tentang bagaimana kekuatan pembuktian *visum et repertum* dalam tindak pidana dan bagaimana kedudukan pembuktian *visum et repertum* dalam penjatuhan putusan oleh hakim. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan dan warna tersendiri yang akan penyusun angkat dalam penelitian ini.

## **E. Tujuan Dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah urgensi pembuktian *visum et repertum* dalam hal penjatuhan putusan tindak pidana oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam hal pembuktian menurut hukum Islam.

### **2. Kegunaan**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan tentang urgensi pembuktian *visum et repertum* dalam hal penjatuhan putusan tindak pidana oleh hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.
- b. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan tentang bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam hal pembuktian menurut hukum Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Pengertian Pembuktian menurut Hukum Islam***

Menurut KBBI pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe-“, dan akhiran “-an” maka mengandung arti proses, perbuatan atau cara membuktikan. Adapun secara terminologi, “pembuktian” berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>1</sup>

Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai tiga arti, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis. Ketiga arti tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Contohnya, berdasarkan aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang.
2. Membuktikan dalam arti konvensional adalah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka. Karena didasarkan atas perasaan, kepastian itu bersifat intuitif (*Convictionintime*).
  - b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*Conviction Raisonnce*).

---

<sup>1</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 31.

3. Membuktikan dalam arti yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>2</sup>

Jika dikaji secara umum, pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Adapun jika dikaji dari makna leksikon, pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Secara sederhana, pembuktian dapat didefinisikan sebagai tindakan memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa satu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi.

Tujuan pembuktian menurut hukum Islam tidak berbeda dengan tujuan pembuktian dalam hukum positif. Memperoleh kejelasan dan kepastian suatu

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 103-104.

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, h. 50-51.

peristiwa adalah tujuan utama dari pembuktian disetiap peradilan manapun, termasuk peradilan Islam. Beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam, diletakkan di atas pundak pendakwa atau penggugat. Sebab, menurut asal, segala urusan diambil dari lahirnya. Karena itu, wajib atas orang yang mengemukakan dakwaan atau gugatan terhadap seseorang/sesuatu untuk membuktikan kebenaran atau dakwaannya.<sup>4</sup>

Adapun dasar hukum dari pembuktian adalah terdapat dalam QS An-Nur /24:

4 yang berbunyi

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksiannya untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa untuk menuduh seseorang telah bersalah atau melakukan kejahatan harus bisa membuktikannya dengan memberikan bukti yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dari alat bukti yang telah dijelaskan dalam hukum Islam. Seseorang tidak bisa menuduh ataupun menetapkan orang lain bersalah tanpa adanya alat bukti yang cukup.

<sup>4</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 33-34.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Keluarga* (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 350.

Dasar hukum yang lain juga terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ...<sup>6</sup>

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah swt. telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan....”<sup>6</sup>

Selain itu, terdapat pula dalam hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَنبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ النَّبِيَّةِ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرَزَمِيُّ يُضَعِّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ ضَعْفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ.<sup>7</sup>

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Keluarga* (Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012), h. 48.

<sup>7</sup>Muhammad bin 'Isa bin Surah bin Musa bin al-Duhak, *al-Jāmi' al-Kabir Sunan al-Tirmizi*, Juz. III (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1998 M), h. 19.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah memberitakan kepada kami Ali bin Mushir dan selainnya dari Muhammad bin Ubaidullah dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan dalam khutbahnya: "Menghadirkan bukti itu wajib atas orang yang menuntut dan mengucapkan sumpah wajib atas orang yang tertuduh." Hadits ini terdapat cela di dalam sanadnya dan Muhammad bin Ubaidullah didha'ifkan dalam periwayatan hadis dari sisi hafalannya. Ibnu Al Mubarak dan yang lainnya mendha'ifkannya".

Meskipun dalam hadis tersebut masih terdapat cela tetapi sudah menjelaskan bahwa dalam suatu perkara seseorang harus bisa menghadirkan suatu alat bukti yang sah yang dapat mendukung suatu tuduhan yang diberikan.

Pembuktian dibebankan kepada orang yang menggugat, untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.<sup>8</sup>

Pembuktian dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, bila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, para hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai

---

<sup>8</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 34.



dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kegiatan pembuktian pada dasarnya digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran.

Bukti secara umum merupakan sebutan segala sesuatu yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran. Terutama dua orang saksi atau empat orang saksi atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi seorang saksi dalam al-Qur'an tidak menyebutkan pembuktian hanya semata-mata dua orang saksi, akan tetapi juga dalam arti keterangan, dalil dan alasan baik secara komulasi maupun sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam prinsip-prinsip pembuktian tidak jauh berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Dari berbagai jenis pendapat tentang makna pembuktian maka dapat disimpulkan bahwa pembuktian merupakan suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti di depan persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat menyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>10</sup> Namun ada pembeda antara hukum Islam dan hukum positif tentang pembuktian yakni al-Qur'an, sunnah dan ijtihad.

---

<sup>9</sup>Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

<sup>10</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 121.

Dalam proses pembuktian dikenal dengan adanya alat-alat bukti yang harus diajukan dalam suatu proses persidangan ataupun dalam proses mencari suatu kebenaran.

### **B. *Macam-macam Alat Bukti dan Pendapat Para Ulama tentang Alat Bukti***

Pembuktian dalam KUHAP dijelaskan pada pasal 183 yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>11</sup>

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dalam penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana yang diatur dalam UU RI NO.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat 1 yang berbunyi:

Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>12</sup>

Menurut Sayid Sabiq, hukum Islam mengenal empat bentuk alat bukti, yaitu:

1. Saksi;

---

<sup>11</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, h. 606.

<sup>12</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, h. 606.

2. Sumpah;
3. Pengakuan;
4. Bukti tertulis yang sah.<sup>13</sup>

Menurut *fuqaha* (para ahli Fikih), alat bukti ada tujuh macam, yaitu:

1. Pengakuan (*iqrar*);
2. Kesaksian (*syahadah*);
3. Sumpah (*yamin*);
4. Menolak sumpah (*nukul*);
5. Bersumpah 50 orang (*qasamah*);
6. Pengetahuan hakim;
7. Persangkaan (*qarinah*).<sup>14</sup>

Lebih rinci lagi, Ibnu Qayyim Al Jauziyah menyebutkan 26 macam alat bukti sebagai berikut:

1. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri yang tidak memerlukan sumpa;
2. Peningkaran penggugat atas jawaban tergugat;
3. Fakta yang berbicara atas dirinya sendiri, disertai sumpah pemegangnya;
4. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka;
5. Penolakan sumpah dan sumpah yang dikembalikan;
6. Saksi satu orang laki-laki tanpa sumpah penggugat;
7. Saksi satu orang laki-laki dengan sumpah penggugat;

---

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah* 9 (Bandug: Al Ma'arif, 1990), h. 15.

<sup>14</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 37.

8. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan;
9. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah;
10. Keterangan saksi dua orang perempuan dan sumpah penggugat;
11. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah;
12. Saksi tiga orang laki-laki;
13. Saksi empat orang laki-laki;
14. Kesaksian budak;
15. Kesaksian anak-anak di bawah umur (sudah *mumayyiz*);
16. Kesaksian orang fasik;
17. Kesaksian non-Islam;
18. Bukti pengakuan;
19. Pengetahuan hakim;
20. Berdasarkan berita *mutawatir*;
21. Berdasarkan berita tersebar (*khabar istifadlah*);
22. Berdasarkan berita orang perorangan;
23. Bukti tulisan;
24. Berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak;
25. Berdasarkan hasil undian;
26. Berdasarkan hasil penelusuran jejak.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 193.

Adapun pendapat para ulama tentang alat-alat bukti adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengakuan

Menurut istilah *fuqaha*, pengakuan adalah mengabarkan suatu hak bagi orang lain. Muhammad Salam Madzkur menjelaskan bahwa pengakuan pemberitahuan tentang adanya hak orang lain atas diri pengaku itu, baik pemberitahuan itu dengan suatu kata-kata maupun dengan apa-apa yang disamakan hukumnya dengan kata-kata walaupun pengakuan itu untuk yang akan datang.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, pengakuan adalah pemberitahuan tentang sesuatu hak. Jadi, ikrar atau pengakuan dalam hukum acara perdata Islam adalah memberitahukan akan adanya hak orang lain pada diri sipengaku. Adapun dalam perkara pidana, pengakuan bermakna memberitahukan adanya tindakan atau perbuatan pelaku yang berakibat melanggar aturan hukum dalam hukum islam.<sup>17</sup>

Alat bukti pengakuan dalam hukum acara perdata apabila pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara dipersidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Namun, jika ternyata dalam suatu perkara pengakuan seseorang terhadap hak kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan terjadinya suatu peristiwa hukum disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang disangkal tersebut harus dapat membuktikan adanya bukti hak kepemilikan atas bendanya dan bukti atau saksi yang melihat dan

---

<sup>16</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 39.

<sup>17</sup>Abdul Qadir Audah, *Tasyri'ul Jinayyil Islamy*, Juz II (Cet. II; Kairo: Darul 'Urubah, 1968), h. 303.

mendengar terjadinya peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara.<sup>18</sup>

Pengakuan yang paling kuat adalah pengakuan tergugat. Untuk memberikan pengakuan maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan dalam keadaan berakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang yang di bawah pengampuan.<sup>19</sup>

Dasar hukum pengakuan terdapat dalam beberapa ayat salah satunya adalah dalam QS al-Baqarah/2: 84 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

Terjemahnya:

“Dan (ingatlah) ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu dan mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi”.<sup>20</sup>

Maksud dari ayat diatas adalah berikrar (memberikan pengakuan) dengan isi perjanjian tersebut dan kebenarannya. Allah swt. telah menetapkan ikrar (pengakuan) mereka, lalu ikrar (pengakuan) tersebut menjadi *hujjah* atau alasan atau bukti bagi mereka.<sup>21</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ikrar atau pengakuan yang

<sup>18</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 273.

<sup>19</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, h. 93-98.

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Keluarga*, h. 14.

<sup>21</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 40.

diucapkan oleh seseorang itu dapat menjadi bukti ataupun alasan bagi yang mengucapkan pengakuan tersebut.

## 2. Kesaksian (*Syahadah*)

Kesaksian dalam hukum acara Islam dikenal dengan istilah *Asy syahadah*.

Menurut bahasa, *asy syahadah* memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.
- b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya.

Menurut Muhammad Salam Madzkur, Persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar disidang pengadilan dengan menggunakan *lafadz syahadah* (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut atas diri sendiri bukanlah kesaksian melainkan ikrar (pengakuan).<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum kesaksian ditetapkan menjadi alat bukti adalah terdapat pada firman Allah swt. yakni QS al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ

<sup>22</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 46.

Terjemahnya:

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil...”<sup>23</sup>

Sementara itu dalam hukum acara pidana kesaksian dikenal sebagai keterangan saksi, yang dimaksud dengan keterangan saksi dalam KUHAP Bab I pasal 1 angka 27 adalah:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”<sup>24</sup>

Kesaksian dapat diterima sebagai alat bukti apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kesaksian dilakukan di dalam sidang pengadilan. Jika dilakukan diluar sidang pengadilan, meski itu dihadapan hakim (saat tidak bersidang), tidak dianggap sebagai kesaksian.
- b. Kesaksian diucapkan dengan *lafadz* kesaksian, seperti “saya bersaksi”.
- c. Jumlah dan syarat orang yang menjadi saksi sesuai dengan ketentuan syariat.

Menurut Abdul Karim Zaidan, syarat-syarat saksi yang dapat diterima kesaksiannya adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa;
- b. Berakal sehat;

---

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Keluarga*, h. 48.

<sup>24</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, h. 562.



- c. Beragama Islam;
- d. Adil;
- e. Mengetahui apa yang dipersaksikan;
- f. Harus dapat melihat; dan
- g. Harus dapat berbicara.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun ada pengecualian untuk menjadi seorang saksi yang terdapat dalam pasal 168 KUHAP, yakni:

- a. Keluarga sedarah at
- b. au semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- c. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- d. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.<sup>25</sup>

Pada dasarnya ketentuan pasal 168 KUHAP itu merupakan asas dimana mereka masing-masing secara relatif tidak berwenang memberikan kesaksian.

### 3. Sumpah (*Yamin*)

---

<sup>25</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 260.

Yang dimaksud dengan alat bukti sumpah adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang di muka hakim untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dalam suatu perkara.

*Fuqoha* telah sependapat bahwa sumpah dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat manakala penggugat tidak mempunyai saksi-saksi. *Fuqoha* mendefenisikan sumpah sebagai suatu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapkan dengan nama Allah bahwa ucapannya itu benar dengan mengingat sifat dan maha kuasanya Allah, dan percaya siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan memperoleh siksaan-Nya.<sup>26</sup>

Dalam pemeriksaan perkara dipersidangan pengadilan apabila tidak ada alat bukti lain yang sah dan juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menentukan suatu putusan apabila dinyatakan dengan jujur tanpa adanya rekayasa. Menurut pasal 1929 BW sumpah terbagi atas dua macam, yakni:

a. Sumpah karena jabatan

Yang dimaksud dengan sumpah karena jabatan adalah seorang hakim yang karena jabatannya mempunyai hak untuk memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk bersumpah sebelum dilakukan pemeriksaan.

b. Sumpah pemutus

Yang dimaksud dengan sumpah pemutus adalah sumpah di muka hakim yang dilakukan oleh salah satu pihak atas permintaan pihak lawan dalam suatu perkara

---

<sup>26</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 64.

untuk memperkuat pengakuan tentang terjadinya peristiwa hukum yang menjadi sengketa.<sup>27</sup>

#### 4. Bukti Tertulis (*Bayyinah Khaththiyah*)

Alat bukti tertulis atau yang juga dikenal sebagai bukti surat dapat berupa surat yang dibuat secara tertulis baik oleh para pihak yang berperkara secara di bawah tangan atau dibuat oleh pihak lain yang karena jabatannya mempunyai hak untuk itu.

Dalam KUHAP secara substansial tentang bukti tertulis atau bukti surat terdapat dalam pasal 187 yang berbunyi:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>28</sup>

Masa sekarang ini, bukti tertulis adalah bukti autentik yang dianggap sangat penting untuk membuktikan kebenaran dakwaan. Pada masa lalu, orang yang pandai menulis masih sangat sedikit sehingga bukti tertulis tidak begitu populer.

---

<sup>27</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 280-282.

<sup>28</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, h. 607.

Menurut Ibnu Qayyim, alat bukti tertulis ada tiga bentuk, yakni sebagai berikut:

- a. Bukti tulisan yang oleh hakim dinilai didalamnya telah terdapat sesuatu yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan keputusan kepada seseorang sehingga imperatif sebagai bukti yang mengikat.
- b. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah sampai dia mengingat mengenai isinya.
- c. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya. Jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan bukti yang sah.<sup>29</sup>

Bukti tulisan atau surat merupakan sebagai akta yang kuat didalam pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Kekuatan pembuktian bukti tertulis atau surat dalam sistem hukum Islam berbeda dengan sistem hukum lainnya, sistem hukum Islam menilai alat bukti surat sesuai dengan porsinya. Ia bisa menjadi alat bukti yang kuat dan menentukan, bisa menjadi sekedar pelengkap dan memantapkan keyakinan hakim, atau bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali dalam pembuktian dipersidangan. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa alat bukti tulisan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, baik dalam menjatuhkan keputusan maupun dalam kesaksian. Namun, dalam mazhab ini ada satu pendapat

---

<sup>29</sup>Ibnu Qoyyum Al Jazuli, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 350.

lain, sama seperti riwayat ketiga dari Ahmad, yaitu alat bukti tulisan bisa dijadikan pegangan apabila didapati arsipnya tersimpan.

#### 5. Persangkaan (*Qarinah*)

*Qarinah* secara bahasa diambil dari kata *muqaranah* yang berarti *mushahabah* (pengertian/petunjuk). Secara istilah *qarinah* diartikan sebagai tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.<sup>30</sup>

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan sementara terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim yang belum terbukti tentang kebenarannya.

Menurut para ahli fikih, *qarinah* terbagi dalam dua bentuk yang sama seperti pembagian *qarinah* di atas, yaitu sebagai berikut:

- a. *Qarinah Urfiyah*, yaitu *qarinah-qarinah* yang oleh ahli fikih diartikan sebagai kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal.
- b. *Qarinah Syari'iyah*, yaitu *qarinah-qarinah* yang dikeluarkan *syara'* dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.<sup>31</sup>

Adapun persangkaan menurut ketentuan khusus yang ada di dalam Undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1916 alinea kedua BW adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 85.

<sup>31</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 87-89.

- a. Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena semata-mata sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menyelendupi suatu ketentuan undang-undang.
- b. Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu.
- c. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
- d. Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.<sup>32</sup>

Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa kalau hanya *qarinah* maka hakim tidak dapat memutuskan perkara. Sementara Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *qarinah* itu dapat digunakan sebagai alat bukti karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Muhammad saw. dan sahabat-sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan *qarinah-qarinah* dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya.

#### 6. Pengetahuan Hakim (*Ilmu Al Qadhi*)

Alat bukti ini menimbulkan perbedaan pendapat diantara para ulama yakni sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 269.

- a. Riwayat masyhur yang dikembangkan oleh para pengikutnya menyebutkan bahwa dalam perkara pidana Imam Ahmad tidak memutus berdasarkan pengetahuannya.
- b. Hakim dibolehkan memutus berdasarkan pengetahuannya dalam perkara pidana *had* dan yang lainnya secara mutlak.
- c. Hakim dibolehkan menjatuhkan keputusannya berdasarkan pengetahuannya, kecuali dalam perkara pidana *had*.<sup>33</sup>

Untuk alat bukti persangkaan dan pengakuan, pengetahuan hakim sangat dibutuhkan dimana hakim dalam persidangan harus betul-betul pandai dan jeli membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjebak salah satu pihak yang berperkara. Selain itu, hasil pemeriksaan dari suatu persidangan sepenuhnya ditentukan oleh hakim karena alat bukti persangkaan dan pengakuan sifatnya bebas sehingga pengetahuan hakim sangat menentukan untuk melakukan pemeriksaan perkara.<sup>34</sup>

### **C. *Pengertian Visum Et Repertum***

*Visum et repertum* memiliki kaitan yang sangat erat dengan ilmu kedokteran forensik atau yang dikenal sebelumnya sebagai ilmu kedokteran kehakiman. Ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain. Tujuan serta kewajiban dari ilmu kedokteran kehakiman

---

<sup>33</sup> Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 92.

<sup>34</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 271.

adalah membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.<sup>35</sup>

Tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu aparat hukum dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengrusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. Dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*.<sup>36</sup>

*Visum et repertum* ialah : “yang dilihat dan diketemukan”, Jadi *Visum Et Repertum* adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan di dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat, Jadi merupakan kesaksian tertulis.

Menurut pendapat Abdul Mun'im Idris *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang ditemukan dan dilihat pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>R.Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, h. 10.

<sup>36</sup>Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* (Jakarta: Djambatan, 2000), h. 26.

<sup>37</sup>Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran* , h. 26.



Sebagai suatu hasil pemeriksaan dari dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, *visum et repertum* digolongkan menurut obyek yang diperiksa yakni sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* untuk orang hidup
  - a. *Visum et repertum* biasa, yakni visum yang diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
  - b. *Visum et repertum* sementara, yakni visum yang diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan *visum et repertum* lanjutan.
  - c. *Visum et repertum* lanjutan, dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain atau meninggal dunia.

2. *Visum et repertum* untuk orang mati (jenazah)

Dalam pembuatan *visum et repertum* ini, apabila korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat.

3. *Visum et repertum* tempat kejadian perkara (TKP), yakni visum yang dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
4. *Visum et repertum* penggalan jenazah, yakni visum yang dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalan jenazah.
5. *Visum et repertum* psikiatri, yakni visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.

6. *Visum et repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bercak mani, selongsong peluru, pisau dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

Dalam penulisan skripsi ini, visum et repertum yang dimaksud adalah visum et repertum untuk orang hidup maupun orang mati yang diakibatkan karena penganiayaan. Adapun contoh dari visum et repertum adalah sebagai berikut

Pro Justitia

**VISUM et REPERTUM**

Nomor: VER/62/III/2015/RUMKIT

Atas permintaan tertulis dari POLSEK MARISO, nomor: B/22/III/2015/ Sekta, tertanggal 19 Maret 2015, bertempat di Ruang Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, maka pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 pukul 11.20 WITA telah memeriksa satu korban hidup dengan identitas: ----

Nama : ILHAM BASO -----  
 Umur : 43 Tahun -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki -----  
 Alamat : Jl. Amirullah Lr. 05 No. 09 Makassar -----

**Hasil Pemeriksaan** : -----

1. Tampak 1 (satu) buah luka memar kemerahan disertai bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 3 cm kali 2 cm. -----
2. Tampak 4 (empat) buah gigi depan tanggal. -----

**Kesimpulan** :-----

1. Telah diperiksa seorang korban hidup berjenis kelamin laki-laki, dan berusia dewasa. -----

---

<sup>38</sup>Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.26.

2. Ditemukan satu buah luka memar kemerahan disertai bengkak pada pipi kiri, dan empat buah gigi depan tanggal dapat sesuai perlukaan akibat trauma benda tumpul. -----
3. Perlukaan tersebut dapat menyebabkan penyakit/halangan untuk menjalankan pekerjaan/jabatan (sesuai untuk kualifikasi luka derajat sedang). -----

**Demikian visum et repertum ini dibuat berdasarkan kompetensi dan sumpah dokter, serta sesuai ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). -----**

Itulah contoh dari *visum et repertum* yang dibuat oleh Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara untuk korban penganiayaan yang dijadikan ataupun diajukan sebagai barang bukti dipersidangan pada Pengadilan Negeri Makassar.

#### **D. Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum***

Dalam KUHP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan *visum et repertum*. Hanya di dalam Staatsblad Tahun 1973 Nomor 350 pada Pasal 1 dinyatakan bahwa *visum et repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.<sup>39</sup>

Menurut Waluyadi, *visum et repertum* merupakan keterangan tertulis dalam bentuk surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan sebagai alat bukti.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Rahman Syamsuddin, *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*, Jurnal Al Risalah, Vol. 11 no.1 (Mei 2011), h. 196.

<sup>40</sup>Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, h. 37.

*Visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana alat bukti yang lainnya dalam persidangan *visum et repertum* berkedudukan sebagai alat bukti surat berdasarkan pasal 187 huruf c KUHAP.

Penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti adalah untuk menunjang tegaknya keadilan yakni untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana terhadap korban dengan melakukan pemeriksaan terhadap diri korban atau pembedahan diri mayat untuk mengetahui kelainan alat tubuh manusia yang mengalami kerusakan atau kematian akibat suatu tindak pidana. *Visum et repertum* dibuat dan dibutuhkan dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan khususnya dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang didalam bagian pemberitaan yang dapat dianggap sebagai bukti.

*Visum et repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum, sehingga dengan membaca *visum et repertum* dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia.

### **E. *Visum Et Repertum menurut Hukum Islam***

Dalam Islam manusia dijamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan beberapa harapan tersebut, maka dalam Islam telah ada seperangkat aturan-aturan dan norma-norma yang harus dilalui umat manusia dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kerusakan, mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, mengendalikan dunia kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda atau jalan yang harus dilalui.<sup>41</sup> Oleh karena itu hukum Islam hadir agar semua hal tersebut dapat tercapai, namun seiring dengan perkembangan zaman banyak hal baru yang kemudian muncul dan tidak terdapat atau diatur dalam hukum Islam. Misalnya saja pembuktian yang dilakukan dengan meminta bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman terhadap korban pencabulan, kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan bantuan dari ilmu kedokteran kehakiman.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter biasa disampaikan dalam bentuk surat yang disebut dengan *visum et repertum*. Visum yang diperoleh dari pemeriksaan dokter tersebut dipakai untuk mengetahui apakah korban terluka atau tidak.

Untuk permintaan *visum et repertum* dapat dilakukann oleh penyidik terhadap korban pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan/pencabulan baik bagi korban

---

<sup>41</sup>Abdi Widjaja, *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat Telaah Konsep Hudup* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 2.

yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam dasar hukum dari pengadaan *visum et repertum* yakni pasal 133 ayat 1-3 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak, dan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.<sup>42</sup>

Dalam pasal 133 ayat 3 tersebut memiliki pandangan yang sama dengan hukum Islam, dimana meskipun seseorang telah meninggal dunia haruslah tetap dihormati dan tidak boleh dirusak jenazahnya. Pada prinsipnya syariat Islam memberikan landasan yang kuat tentang adanya kehormatan bagi setiap muslim untuk menghormatinya baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, seperti firman Allah swt. dalam QS Al-Isra'/17:70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

<sup>42</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, h. 593.

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”<sup>43</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ajaran Islam menghormati seseorang yang telah meninggal yakni dengan adanya perawatan mayat/jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalati dan menguburkannya dengan cara yang baik, oleh karena itu tidak boleh diperlakukan dengan cara-cara yang nantinya akan menyakiti atau merusak keadaan mayat.

Dari penjelasan ayat tersebut melakukan pembedahan mayat itu dilarang, akan tetapi jika pembedahan mayat tersebut tidak dilakukan maka dunia medis tidak akan berkembang. Karena pembedahan mayat tersebut bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab kematian korban dan untuk mengetahui tindak pidana apa yang terjadi terhadap korban. Jika pembedahan tidak dilakukan maka korban akan semakin banyak lantaran belum diketahui pelaku tindak pidana atas korban tersebut.

Dengan demikian jika menghadapi kesulitan, maka menurut agama Islam adalah menggunakan penalaran yang masuk akal untuk memecahkannya. Dalam memecahkan suatu perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka harus berusaha menggunakan akal sebagai pemecahnya atau yang disebut dengan berijtihad. Karena penggunaan akal dalam memecahkan suatu masalah dengan merujuk pada al-Qura'an merupakan suatu aktivitas atau upaya untuk menjaga

---

<sup>43</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Keluarga*, h. 289.

kelestarian dan keutuhan al-Qur'an sebagai nikmat Allah swt. yang harus dipertahankan dan sebagai dalil kebenaran yang rasional serta tidak terbantahkan.<sup>44</sup> Hasil dari ijtihad itu dapat digunakan sebagai kemaslahatan umum dan kepentingan umum yang didahulukan dari kepentingan individu.

Pembedahan mayat atas korban tindak pidana penganiayaan ataupun pemeriksaan luka terhadap korban tindak pidana penganiayaan itu membawa perkembangan bagi pengetahuan yang berguna untuk kemanusiaan, menyelamatkan orang-orang yang hampir meninggal dan meminimalisir adanya tindak pidana yang merugikan diri korban. Karena alasan tersebut kekhawatiran untuk menghormati mayat dikesampingkan demi terwujudnya kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak. Dengan demikian penggunaan *visum et repertum* dalam tindak pidana penganiayaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti.

*Visum et repertum* dalam hukum Islam dikategorikan sebagai alat bukti tertulis atau bukti surat atau *al-bayyinah* yang dibuat oleh seseorang karena jabatannya memiliki hak untuk itu, dalam hal ini yang dimaksud adalah dokter ahli.

---

<sup>44</sup>Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin Universty Press, 2011), h. 70.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Adapun Jenis dan Lokasi dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif lapangan. *Penelitian Kualitatif* adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.

##### **2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang ditempati oleh penulis dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Makassar karena studi kasus dalam penelitian ini adalah pada Pengadilan Negeri Makassar yang dianggap tepat sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Pengadilan Negeri Makassar dianggap tepat karena dibandingkan dengan Pengadilan Negeri yang lain Pengadilan Negeri Makassar lebih banyak menangani kasus-kasus yang diteliti. Selain itu, tempatnya lebih mudah dijangkau sehingga dalam penelitian penulis akan lebih cepat memperoleh data-data yang akurat. Untuk menambah data yang diperlukan penelitian juga dilakukan pada masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih lagi tentang hukum Islam.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Fenomenologi**

Menurut KBBI fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari perkembangan kesadaran dan pengenalan diri manusia sebagai ilmu kebenaran.<sup>1</sup> Jadi pendekatan ini adalah pendekatan filosofis dengan melihat fenomena yang sebenarnya terjadi dimasyarakat atau pengalaman-pengalaman yang dialami oleh masyarakat itu sendiri.

### **2. Pendekatan Yuridis Normatif**

Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.

### **3. Pendekatan Normatif Syar'i**

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada hukum islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama.

### **4. Pendekatan Sosiologis**

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaedah-kaedah yang terdapat dalam ilmu sosiologi. Dalam pendekatan metode ini mempelajari sebab musabab terjadinya kejahatan dengan menggunakan analisis yang

---

<sup>1</sup>Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya: Terbit Terang, 1999), h. 114.

didasarkan pada statistik sebagai data utamadengan menghubungkan wilayah-wilayah terjadinya kejahatan yang dikaitkan dengan unsur-unsur sosial lainnya.<sup>2</sup>

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data ini dikumpulkan melalui *Field research* atau penelitian lapangan dengan cara interview, yakni kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui catatan yang tertulis atau melalui rekaman vidio dan alat rekam yang sejenisnya, dalam hal ini yang menjadi informan adalah hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Selain itu, untuk mendapatkan data yang lebih sepurna maka wawancara juga dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai hukum Islam.

#### **2. Data Sekunder**

Data ini dikumpulkan melalui *Library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini baik itu melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

---

<sup>2</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 61.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.
2. Wawancara atau interview adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada orang yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara penanya dengan informan.<sup>3</sup>
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen dapat berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

---

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri* (Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 57.

## 2. Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data.

## 3. Kamera

Alat ini digunakan untuk memotret oleh peneliti dalam melakukan pembicaraan atau mewawancari informan.

## 4. Tape recorder

Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat itu kurang akurat jadi rekaman tersebut dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

# **F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

## 1. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau pembicaraan langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar. Sedangkan metode penelitian kepustakaan merupakan upaya untuk mendapatkan data-data sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa buku-buku peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan lainnya.

## 2. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan. Penulis menggunakan metode

analisa data kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kedudukan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan menurut hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dimana selain melihat dalam buku-buku juga melihat secara langsung fakta-fakta atau pengalaman-pengalaman yang terjadi dimasyarakat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Selayang Pandang Pengadilan Negeri Makassar***

##### **1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar**

Kantor Pengadilan Negeri Kota Makassar terletak di Jalan R.A Kartini No. 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri Makassar sangat strategis tepatnya berada ditengah kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat Kota Makassar menjangkau pengadilan tersebut. Gedung utama Pengadilan Negeri Makassar berdiri di atas lahan seluas 7187 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 2250 m<sup>2</sup>. Saat ini gedung Pengadilan Negeri Makassar sudah di perluas namun baru sebagian yang dipergunakan.

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama *Read van Justitia*. Namun, pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK penetapan BCB pada tahun 2010. Dahulu bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi, yakni *Read van Justitia* yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Cina dan orang pribumi keturunan bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan *Landraad* yang merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi yang terletak dibagian selatan bangunan.

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar memiliki struktur organisasi yang bersifat tetap. Untuk saat ini, struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar tersusun oleh perangkat-perangkat kerja yang terdiri dari, Ketua, Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, yang membawahi Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda PHI. Wakil Sekretaris yang membawahi Kepala Sub Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum. Selain Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera, Panitera/Sekretaris juga membawahi Panitera Pengganti dan Jurusita. Hakim berada di bawah kontrol Ketua.

Terdapat 8 (Delapan) ruang sidang di Pengadilan Negeri Makassar yang digunakan untuk menyidangkan perkara Pidana, Perdata, Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Niaga, Hak Asasi Manusia serta Perkara pidana yang melibatkan Anak. Selain itu terdapat juga Pengadilan Hubungan Industrial. Letak Pengadilan Negeri Makassar juga tidak jauh dari perkotaan pemerintah lainnya, seperti kantor Wali Kota Makassar, Kantor Polrestabes Makassar, Kantor BI Cabang Makassar, Menara Bosowa, dan pusat perbelanjaan.

## 3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Makassar

Pengadilan Negeri Makassar sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata yang wilayah hukumnya terdapat di Kota Makassar. Tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa, dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Makassar yang



berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Dalam bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Makassar sangat berperan memeriksa dan menyelesaikan perkara yang dipersengketakan antara penggugat dan tergugat.

***B. Urgensi Pembuktian Visum Et Repertum dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar***

Setiap perkara yang dihadapi oleh hakim dalam persidangan haruslah melewati beberapa tahap ataupun harus melakukan beberapa tindakan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan, seperti dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dalam persidangan, rapat musyawarah hakim dan pengucapan sumpah/putusan dengan menerapkan hukum positif.

Ada beberapa tahapan yang harus dilewati dalam suatu persidangan di Pengadilan Negeri Makassar begitupun untuk Pengadilan Negeri yang lain dan setiap perkara pidana itu biasanya memiliki tahapan yang sama, tidak terkecuali dengan tahapan persidangan untuk kasus penganiyaan. Namun untuk tindak pidana penganiyaan ringan biasanya tahapannya lebih singkat dibandingkan dengan tindak pidana penganiyaan berat ataupun tindak pidana lainnya. Untuk menjatuhkan suatu pidana memerlukan proses pembuktian agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya. Begitulah yang diungkapkan oleh bapak Suparman Nyompa salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar.<sup>1</sup>

Pada proses persidangan di pengadilan, pembuktian merupakan aspek esensial dan fundamental untuk dilakukan, baik dilakukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa bersama penasihat hukumnya maupun oleh majelis hakim. Pada hakikatnya pembuktian mempunyai dua dimensi sebagai suatu proses pidana yang dilakukan, mulai dari tahap penyelidikan sebagai awalnya dan penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim sebagai tahap akhirnya. Kegiatan pembuktian juga dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni bagian pengungkapan fakta dan bagian pekerjaan penganalisisan fakta sekaligus penganalisisan hukum.<sup>2</sup>

Penjatuhan pidana atau putusan oleh hakim dalam dimensi hukum pembuktian secara umum mengacu pada ketentuan pasal 183 KUHP yang menentukan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari uraian pasal 183 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa seseorang tidak dapat dijatuhkan pidana apabila tidak ada bukti yang menyatakan bahwa seseorang tersebut bersalah. Sementara menurut bapak Ibrahim Palino sistem

---

<sup>1</sup>Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

<sup>2</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), h. 54.

<sup>3</sup>Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHP (t.t.: WIPRESS, 2008), h. 606.

pembuktian dalam KUHAP itu terdiri atas teori pembuktian berdasarkan UU secara positif, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan teori pembuktian berdasarkan UU secara negatif. Menurut beliau untuk memutuskan suatu perkara harus berpatokan pada keempat teori pembuktian tersebut agar dapat memutuskan dengan adil.<sup>4</sup>

Untuk menjatuhkan suatu putusan harus betul-betul memperhatikan seluruh aspek yang ada, tidak boleh hanya berpatokan pada satu aspek saja ataupun tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak agar tidak ada kesalahan dalam penjatuhan putusan.

Menurut bapak Ibrahim Palino dalam penjatuhan putusan itu harus memperhatikan semua unsur-unsur yang terkait dengan perkara tersebut termasuk alat bukti yang ada. Seperti halnya untuk tindak pidana penganiayaan ada alat bukti yang dibuat atau berasal dari pemeriksaan dokter ahli yang dikenal dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang sangat penting karena ada bagian-bagian dalam hal pembuktian yang tidak dapat dilakukan oleh penyidik khususnya penyidik Polri tanpa bantuan dari yang ahli dibidang kedokteran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bidang kedokteran forensik sangat diperlukan dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup>Ibrahim Palino (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Februari 2016.

tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Misalnya dalam tindak pidana pemerkosaan, pembunuhan dan penganiayaan.<sup>5</sup>

Menurut keterangan Bapak Muhtaruddin selaku Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengatakan bahwa:

“Sangat penting dan juga terdapat dalam al-Qur’an dan hadits, dan ini tidak melanggar norma agama, apalagi tujuannya untuk membuktikan apakah betul terjadi peristiwa itu atau tidak. Dan *visum et repertum* ini dapat dilakukan karena akan menjadi catatan abadi untuk korban untuk dibuktikan dipersidangan, misalnya luka lebam yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam KDRT, biasanya istri tidak langsung melapor karena mungkin harapannya masih bisa kembali dengan suaminya dan berharap dalam rentang waktu agar suaminya sadar. Dengan demikian, bisa saja bukti-bukti penganiayaan itu hilang, apakah dia berobat atau sembuh sendiri, namun adanya catatan medis dari dokter kemudian termuat dalam bentuk hasil visum itu, meskipun bekasnya sudah hilang atau sudah sembuh. Dan itulah kemudian yang meyakinkan bahwa memang terjadi KDRT, memang terjadi penganiayaan, memang terjadi pemaksaan hubungan suami istri, jadi sangat perlu.”<sup>6</sup>

Dari hasil wawancara yang diperoleh maka dapat dikatakan bahwa *Visum et repertum* sangat diperlukan dalam pembuktian karena visum ini termasuk ke dalam alat bukti tertulis yang dapat memberikan keterangan terjadinya suatu peristiwa.

Bukti dalam peradilan berhubungan dengan skala waktu, jadi penting sekali bantuan dari dokter dimana kondisi tubuh manusia adalah dinamis, baik luka-luka maupun mayat. Dalam kedokteran yang bisa diselidiki secara obyektif adalah luka akibat yang ditimbulkan oleh penganiayaan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, proses pembuktian

---

<sup>5</sup>Ibrahim Palino (54 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Februari 2016.

<sup>6</sup>Mukhtaruddin (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 15 Maret 2016.

<sup>7</sup>Purnawan Junadi dkk, *Kapita Selekta Kedokteran Edisi Kedua*, h. 738.

dengan menggunakan *visum et repertum* dalam dunia peradilan merupakan suatu unsur yang sangat urgen atau penting.

Adapun alasan-alasan hukum yang menjadi dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana penganiayaan adalah alasan objektif dan subjektif. Selain itu, dilihat juga adanya unsur perbuatan dan unsur pembuat, apabila kedua unsur tersebut sudah terpenuhi maka hakim dapat menjatuhkan putusan.<sup>8</sup>

Penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Makassar itu sudah biasa digunakan apalagi bagi tindak pidana penganiayaan yang tidak memiliki banyak bukti atau petunjuk terhadap pembuktian dalam perkara tersebut, oleh karena itu adanya bukti *visum et repertum* sangat berpengaruh pada saat hakim akan menjatuhkan putusan karena untuk perkara penganiayaan yang kurang atau minim alat buktinya sangat membutuhkan bantuan dari dokter ahli untuk membuktikan penganiayaan atau bekas luka tersebut

Adapun data yang diperoleh dari kasus-kasus penganiayaan yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2015 adalah sebanyak 63 kasus, yang memperlihatkan bahwa betapa mudahnya seseorang melakukan penganiayaan. Menurut data register yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, kasus yang masuk di bulan Januari sebanyak 10 kasus, Februari sebanyak 6 kasus, Maret sebanyak 13 kasus, April sebanyak 9 kasus, Mei sebanyak 5 kasus, Juni sebanyak 4 kasus, Juli

---

<sup>8</sup>Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

sebanyak 2 kasus, Agustus tidak ada kasus, September 5 kasus, Oktober 2 kasus, November 4 kasus dan Desember 3 kasus. pelaku penganiayaan bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak. Sementara itu, kasus penganiayaan yang menggunakan alat bukti *visum et repertum* adalah 43 kasus dalam pembuktiannya sedangkan 20 kasus lainnya tidak menggunakan alat bukti *visum et repertum* karena dua alasan yakni karena alat bukti yang ada sudah cukup kuat tanpa adanya *visum et repertum* dari dokter serta karena keluarga dari pihak korban menolak untuk melakukan *visum et repertum* tersebut.

Permintaan pemeriksaan dokter ahli dalam pembuatan *visum et repertum* sangatlah dibutuhkan untuk beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tubuh manusia seperti halnya dalam tindak pidana penganiayaan karena dengan adanya hasil pemeriksaan dari dokter tersebut dapat dibuktikan adanya penganiayaan dilakukan sangatlah membantu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Urgensi *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar memiliki posisi sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa benar telah terjadi penganiayaan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter ahli yang memiliki kekuatan pembuktian di dalam persidangan, apa lagi bagi perkara yang tidak memiliki banyak alat bukti, tapi tidak selamanya *visum et repertum* itu memiliki kekuatan yang mengikat karena untuk perkara yang sudah dapat dibuktikan tanpa

harus ada hasil pemeriksaan dari dokter tersebut, maka kekuatan pembuktian *visum et repertum* tersebut tidaklah mengikat dan hanya sebagai pelengkap saja.<sup>9</sup>

Dalam proses pembuktian di Pengadilan Negeri Makassar itu tidak mungkin dapat tercapai kebenaran mutlak karena pengetahuan hakim hanya bersifat relatif saja yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Olehnya itu hakim juga tidak boleh hanya berpatokan pada satu alat bukti saja seperti halnya dalam tindak pidana penganiayaan yang alat buktinya tidak mencukupi maka alat bukti *visum et repertum* itu sangatlah dibutuhkan untuk proses pembuktiannya bahkan akan menjadi alat bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum.

Menurut beberapa Panitera Di Pengadilan Negeri Makassar, untuk perkara tindak Pidana Penganiayaan, penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti sangat membantu hakim dalam memutus perkara di persidangan karena alat bukti tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap kebenaran dari adanya penganiayaan yang dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan dari dokter ahli tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan dari alat bukti *visum* tersebut sangatlah penting.

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa urgensi dari pembuktian *visum et repertum* dalam penjatuhan putusan oleh hakim adalah *visum et repertum* merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *visum et repertum* merupakan alat bukti pelengkap saja. Namun dalam kasus-kasus tertentu

---

<sup>9</sup>Suparman Nyompa (52 tahun), Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 28 Januari 2016.

dimana bukti yang ada sangatlah minim atau kurang , maka *visum et repertum* merupakan bukti pokok yang harus dijadikan dasar oleh hakim. Sehingga *visum et repertum* juga dapat dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan.

### **C. Kedudukan Visum Et Repertum dalam Pembuktian menurut Hukum Islam**

Tujuan hukum dari Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan pada manusia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Hukum Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan serta melindungi hak-hak setiap manusia, itulah sebabnya hukum Islam merupakan hukum yang sangat bagus untuk digunakan. Dan kedudukan *visum et repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam istilah Islam dikenal dengan kata *al-Bayyinah*, karena hasil dari visum itu berupa surat-surat yang tertulis.

Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ustadz Hasan Nur yang mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang terbaik untuk dipakai atau digunakan karena aturannya yang terdapat di dalam al-Qur'an sudah jelas dan tidak memiliki keraguan sedikitpun di dalam-Nya, tapi dinegara kita ini hukum Islam tidak bisa kita gunakan karena negara kita bukanlah negara Islam dan juga terdiri dari bermacam-macam agama. Beliau juga mengungkapkan bahwa sebenarnya sangat disayangkan kenapa negara kita tidak menggunakan hukum Islam saja, padahal hukum Islam dapat memberikan efek jera yang lebih baik dibandingkan dengan hukum yang berlaku sekarang dinegara kita ini. Beliau juga mengatakan bahwa



menurut analisa manusia, hukum Islam itu bertentangan dengan hak asasi manusia, sebab banyak hukuman yang dianggap terlalu kejam dan tidaklah manusiawi seperti orang yang membunuh juga harus dibunuh atau orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya.<sup>10</sup>

Ajaran Islam merupakan ajaran yang universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu. Universalitas ajaran Islam membawa konsekuensi terhadap komprehensifitas kandungan ajarannya dalam menjawab setiap permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu, sehingga setiap perbuatan dan aktifitas manusia, baik yang sudah, sedang, maupun yang akan terjadi telah tercantum dalam kandungan ajaran Islam itu sendiri yakni tercantum dalam al-Qur'an.<sup>11</sup>

Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia telah ditetapkan dalam al-Qur'an, oleh karena itu sepatutnyalah kita berpedoman pada al-Qur'an tersebut, tidak perlu mencari sumber atau dasar hukum yang lain karena semuanya telah dijelaskan di dalam al-Qur'an.

Menurut keterangan Mukhtaruddin menjelaskan bahwa:

“Kedudukan *visum et repertum* dalam hukum Islam itu sangat penting kedudukannya karena kita dalam memutus sebuah perkara itu dikatakan *hasinnasa fil majelis*, ini surat risalahnya Umar kepada hakim yang diutus yaitu Muas yang artinya berbuat adillah, persamakan manusia di depan majelis, salah satu bentuk persamaan yaitu mendengar kedua belah pihak dan mendengar itu harus dikuatkan dengan bukti-bukti. Karena jika kita tidak berdasar pada alat bukti maka kita hanya mendengar saja curhat. Terlalu berbahaya jika sebuah putusan itu hanya dibangun atau dilandasi terhadap hasil curhat saja. Karena itu, kedudukan visum dalam hukum Islam sangat

---

<sup>10</sup>Hasan Nur (50 tahun), Ustadz, *Wawancara*, Makassar, 4 Februari 2016.

<sup>11</sup>Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 1.

penting, sangat penting dan memiliki nilai pembuktian yang sangat maksimal. Dan juga sebenarnya visum ini bisa menghadirkan ahli, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa hakim itu Maha mengetahui karena yang Maha Mengetahui itu hanya Tuhan saja, sehingga terhadap terjadinya sebuah penganiayaan yang kemudian dituangkan ke dalam hasil visum itu adalah salah satu bentuk cara untuk mendengar para pendapat ahli dalam hal ini medis”<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa kedudukan visum et repertum dalam hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, karena alat bukti visum ini telah ada sebelumnya pada masa Rasulullah, yakni Sahabat Umar. Karena dengan kedudukan visum ini yang sangat penting untuk dijadikan sebagai alat bukti maka tidak hanya dengan meminta keterangan atau putusan dari hakim saja melainkan juga diminta dari keterangan ahli, dengan tujuan agar alat bukti visum ini diketahui kebenarannya yang lebih pasti, apalagi jika digunakan untuk tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Selain itu, hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat alat bukti sebagai dasar atau landasan dari amar putusannya, sehingga alat bukti visum ini dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting.

Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik kerugian itu mengenai anggota badan, jiwa, harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik atau kehormatan, perasaan ataupun lain-lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan jahat, karena menimbulkan dampak yang merugikan pihak lain,

---

<sup>12</sup>Mukhtaruddin (37 tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 15 Maret 2016.

baik dalam bentuk anggota badan, jiwa atau harta benda maupun gangguan ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.<sup>13</sup>

Untuk mengetahui seseorang telah melakukan suatu perbuatan jahat atau perbuatan yang merugikan orang lain dibutuhkan suatu pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang dilakukannya tersebut. Pembuktian dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Jika ingin mengadili seseorang harus ada proses pembuktian karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, bila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah, terdakwa harus dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi sehingga akan mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi.

Sementara itu, menurut Ustadz Hasan Nur alat bukti yang dikenal dalam hukum Islam itu adalah saksi, sumpah dan pengakuan. Menurut Beliau alat bukti

---

<sup>13</sup>Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam I* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 8.

saksi itu merupakan alat bukti utama dari alat bukti yang lainnya karena menurutnya meskipun ada alat bukti seperti sumpah ataupun pengakuan dari pihak yang berperkara namun tidak ada saksi yang menyaksikan, melihat ataupun mendengar sendiri kejadian tersebut maka perkara tersebut tidak dapat diadili karena menurutnya sumpah dan pengakuan tersebut hanyalah alat bukti pelengkap saja.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Bapak Ambo Asse, dalam Islam itu ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan seperti keterangan saksi, pengakuan, sumpah, dan bukti tertulis yang sah. Menurutnya untuk membuktikan seseorang itu bersalah tidak boleh asal langsung saja, kita harus melihat dulu apa bukti bahwa dia melakukan kesalahan tersebut dengan mendengar keterangan dari saksi yang ada, pengakuan dari para pihak, sumpah serta kalau ada bukti tertulis yang sah.<sup>15</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa perkara atau tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan jika tidak ada pemeriksaan dari dokter ahli, seperti tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan ataupun pembunuhan yang memerlukan pemeriksaan dari dokter ahli yang kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan yang dikenal dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* saat ini sudah digunakan sebagai alat bukti surat ataupun sebagai keterangan ahli.

---

<sup>14</sup>Hasan Nur (50 tahun), Ustadz, *Wawancara*, Makassar, 4 Februari 2016.

<sup>15</sup>Ambo Asse (54 tahun), Ketua Umum Muhammadiyah Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Gowa, 18 Februari 2016.

Menurut Bapak Ambo Asse:

“Penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam hukum Islam merupakan hal yang baru karena dalam hukum Islam tidak pernah dibahas mengenai alat bukti *visum et repertum*. Alat bukti yang ada itu hanya yang telah saya sebutkan tadi yaitu keterangan saksi, pengakuan sumpah dan bukti yang tertulis, tapi jika dikehendaki adanya alat bukti yang lain yang dapat menyelesaikan persoalan yang ada maka itu boleh saja dilakukan.”<sup>16</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan alat bukti *visum et repertum* dalam Islam itu dibolehkan selama dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan karena alat bukti yang ada tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Ustadz Hasan Nur mengungkapkan bahwa:

“Kalau dalam hukum Islam itu tidak perlu ada penggunaan *visum et repertum*, yang penting itu ada dua saksi maka itu sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti karena bisa saja visum yang dibuat adalah palsu atau dapat dipalsukan, dan alat bukti *visum et repertum* itu ada tapi tidak ada saksi maka alat bukti visum tersebut juga tidak akan memiliki kekuatan.”<sup>17</sup>

Dengan demikian, maka hasil wawancara yang diperoleh bahwa alat bukti *visum et repertum* itu bukan alat bukti pokok melainkan hanya menjadi alat bukti pelengkap. Artinya bahwa jika alat bukti lainnya telah terpenuhi seperti alat bukti surat, alat bukti saksi atau pun alat bukti lainnya maka alat bukti visum ini tidak perlu lagi digunakan karena dengan alat bukti yang lainnya telah cukup untuk dijadikan

---

<sup>16</sup>Ambo Asse (54 tahun), Ketua Umum Muhammadiyah Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Gowa, 18 Februari 2016.

<sup>17</sup>Hasan Nur (50 tahun), Ustadz, *Wawancara*, Makassar, 4 Februari 2016.

sebagai alat buti dalam persidangan, alat bukti *visum et repertum* dalam Islam bukanlah suatu alat bukti yang mengikat.

Sementara itu, Bapak Ambo Asse memiliki pendapat yang berbeda, menurut Beliau syariat Islam tidak boleh terbelenggu oleh kekakuan dan ketinggalan zaman, itulah sebabnya jika ada persoalan yang tidak dijelaskan oleh al-Qur'an, maka kita dapat melakukan ijtihad agar dapat memecahkan persoalan yang ada. Seperti halnya penggunaan *visum et repertum* sebagai alat bukti itu merupakan suatu hasil ijtihad.<sup>18</sup> Agar aturan yang dihasilkan dari al-Qur'an tetap dapat dilaksanakan dan diamalkan dengan baik, maka perlu diadakan penyesuaian dengan kondisi dan situasi dimana manusia itu berada, sehingga sesuai dengan segala tempat dan zaman.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka, baik penganiayaan ringan sampai pada penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia membutuhkan bantuan dari dokter ahli untuk membuktikan kebenaran dari tindak pidana tersebut yakni dengan melakukan pemeriksaan ataupun pembedahan terhadap tubuh korban yang kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang disebut dengan *visum et repertum*.

Dengan demikian syariat Islam menimbang antara maslahat dan mudarat kemudian menetapkan hukum mana yang terkuat diantara keduanya menurut

---

<sup>18</sup>Ambo Asse (54 tahun), Ketua Umum Muhammadiyah Sulawesi Selatan, *Wawancara*, Gowa, Februari 2016.

<sup>19</sup>Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, h. 2-3.

kebijaksanaan dan pandangan yang tepat. *Visum et repertum* sebagai alat bukti dalam kasus untuk orang yang luka maupun orang yang sudah meninggal dalam hukum Islam pada prinsipnya memberikan landasan yang kuat tentang adanya kehormatan bagi setiap muslim untuk menghormati baik masih hidup atau yang sudah mati.

Oleh karena itu, kedudukan *visum et repertum* dalam hukum Islam adalah sebagai penerapan ijtihad bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yakni sebagai alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah* karena dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia, oleh sebab itu *visum et repertum* dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' karena merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam. *Visum et repertum* sebagai alat bukti yang baru dalam Islam, yang kemudian dapat digunakan sebagai pembaharuan dalam hukum karena Islam itu selalu dinamis dan bersesuaian dengan perkembangan zaman.

Alat bukti *visum et repertum* dalam hukum Islam merupakan suatu hal yang baru dan merupakan ijtihad sedangkan dalam hukum nasional *visum et repertum* dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat maupun sebagai keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti atau *al-bayyinah* baik dalam hukum nasional kita maupun dalam hukum Islam itu pada dasarnya sama, yakni dapat dijadikan sebagai alat bukti pokok yang mengikat dan berkekuatan hukum apabila bukti yang dimiliki sangat kurang, namun untuk perkara yang sudah memiliki cukup alat bukti penggunaan *visum et repertum* hanyalah sebagai bukti pelengkap saja.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi dari pembuktian *visum et repertum* dalam penjatuhan putusan oleh hakim adalah *visum et repertum* merupakan alat bukti yang tidak mengikat bagi hakim, sehingga *visum et repertum* merupakan alat bukti pelengkap saja. Namun dalam kasus-kasus tertentu dimana bukti yang ada sangatlah minim atau kurang , maka *visum et repertum* merupakan bukti pokok yang harus dijadikan dasar oleh hakim. Sehingga *visum et repertum* juga dapat dapat dijadikan sebagai bukti yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum sehingga *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh tim dokter ahli merupakan suatu kebutuhan.
2. Kedudukan *visum et repertum* dalam hukum Islam adalah sebagai penerapan ijtihad bagi hakim untuk memperoleh kebenaran dan keadilan yakni sebagai alat bukti tepatnya sebagai alat bukti tertulis atau dalam Islam dikenal dengan istilah *al-bayyinah* karena dapat menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia, oleh sebab itu *visum et repertum* dijadikan sebagai salah satu alat bukti untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibolehkan oleh syara' karena merupakan realisasi dari tujuan syariat Islam. *Visum et repertum* sebagai alat



bukti yang baru dalam Islam, yang kemudian dapat digunakan sebagai pembaharuan dalam hukum karena Islam itu selalu dinamis dan bersesuaian dengan perkembangan zaman.

### **B. *Implikasi Penelitian***

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada Pengadilan Negeri Makassar bahwa untuk mendapatkan alat bukti yang maksimal dalam proses peradilan, maka hakim harus menerima alat bukti *visum et repertum* sebagai alat bukti yang pokok terutama dalam kasus penganiayaan karena *visum et repertum* merupakan alat bukti yang nyata yang isinya dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Kemudian dalam proses persidangan hakim harus melakukan pemanggilan terhadap saksi ahli untuk memperjelas surat *visum et repertum* yang telah dibuatnya.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Husnah, anak bungsu dari 2 bersaudara yang lahir di Sungguminasa pada tanggal 8 Agustus 1992, anak dari pasangan Sulaiman dan Jawariah yang berasal dari Desa Kampili Kec. Pallangga Kab. Gowa. Jenjang pendidikan SD Inpres Kampili dan melanjutkan sekolah menengah pertama pada SMP Negeri 2 Pallangga dan lanjut Pada Sekolah di SMA Negeri 1 Pallangga di Kab. Gowa. Adapun pengalaman organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan sebagai Bendahara Umum, dan telah ikut bergabung pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan ikut berperan aktif dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Bidikmisi (HIMABIM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazuli, Ibnu Qoyyum. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, t.th.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Hamdani, Njowito. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. VIII; Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Jakarta: t.p., 2008.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam I*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Junadi, Purnawan. *Kapita Selekta Kedokteran Edisi Kedua*. Jakarta: Media Aesculapius, 1982.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Keluarga*. Bandung: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata, KUHP dan KUHAP (t.t.: WIPRESS, 2008), h. 590.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Liberti, 1988.
- Marhijanto, Bambang. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*. Surabaya: Terbit Terang, 1999.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Cet. I; Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ranoemihardja, R. Atang. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Bandung: Tarsito, 1983.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Shuhufi, Muhammad. *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Cet. IV; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Supardin. *Materi Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Syamsuddin, Rahman. *Peranan Visum Et Repertum di Pengadilan*, Jurnal Al Risalah, Vol. 11 no.1, Mei 2011.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Widjaja, Abdi. *Penerapan Hukum Pidana Islam menurut Mazhab Empat Telaah Konsep Hudud*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas dan reliabilitas, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut:

### **A. Pertanyaan untuk Hakim, yaitu:**

1. Menurut Bapak Bagaimana tahap-tahap di Persidangan terkait dengan tindak pidana Penganiayaan?
2. Menurut Bapak alasan-alasan Hukum apa yang menjadi dasar oleh Hakim dalam memutus/menjatuhkan vonis kepada pelaku tindak pidana Penganiayaan?
3. Menurut Bapak apakah alat bukti visum et repertum sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan?
4. Menurut Bapak bagaimana urgensi dari pembuktian visum et repertum dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penganiayaan oleh hakim?
5. Menurut Bapak bagaimana kedudukan visum et repertum dalam Hukum Nasional?

### **B. Pertanyaan untuk Ulama/Pakar Islam, yaitu:**

1. Bagaimana tanggapan ustadz terkait visum et repertum dalam Hukum Islam?
2. Menurut Ustadz apakah visum et repertum tidak melanggar Norma Agama dalam Hukum Islam?
3. Menurut ustadz dapatkah visum et repertum dilakukan terhadap tindak pidana penganiayaan?

4. Menurut ustadz bagaimana kedudukan visum et repertum dalam Hukum Islam?
5. Menurut ustadz bagaimana urgensi dari pembuktian visum et repertum dalam Hukum Islam?